



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOYUN HANDOYO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **241514**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.940.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 1.644 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/560 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 354.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 162.702.632

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.492.829

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 2.685.395.461

III. HUTANG Rp. 110.044.807

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.575.350.654

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASRIYANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 140556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	56.000.000
1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BT2WA/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	85.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	493.000.000
III. HUTANG	Rp.	165.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	328.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.